

TESIS

KEKUATAN PEMBUKTIAN
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TERBIT
OTOMATIS MELALUI *ONLINE SINGLE*
***SUBMISSION RISK BASED APPROACH* DALAM**
PERADILAN TATA USAHA NEGARA



Oleh
AMELIA RIZKA ANSHARI
NIM. 2420215320011

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN

2026

**KEKUATAN PEMBUKTIAN
KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TERBIT
OTOMATIS MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION*
RISK BASED APPROACH DALAM
PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**AMELIA RIZKA ANSHARI
NIM. 2420215320011**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

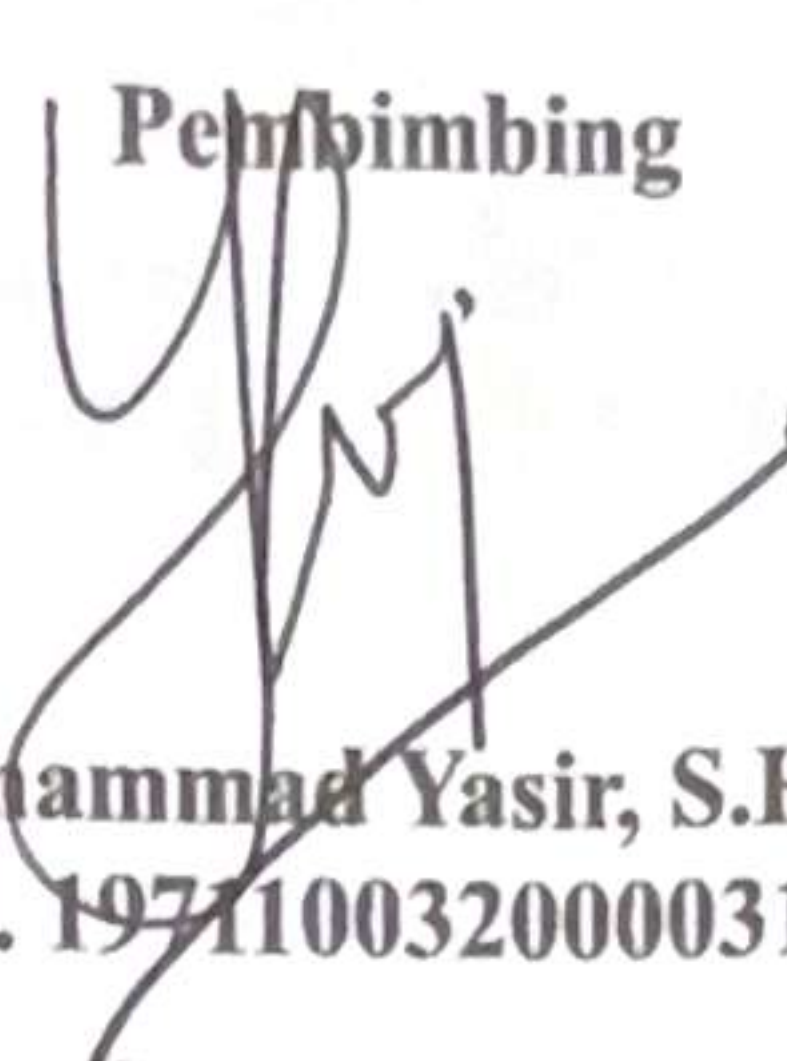
Judul Tesis : KEKUATAN PEMBUKTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TERBIT OTOMATIS MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH* DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Nama : Amelia Rizka Anshari

NIM : 2420215320011

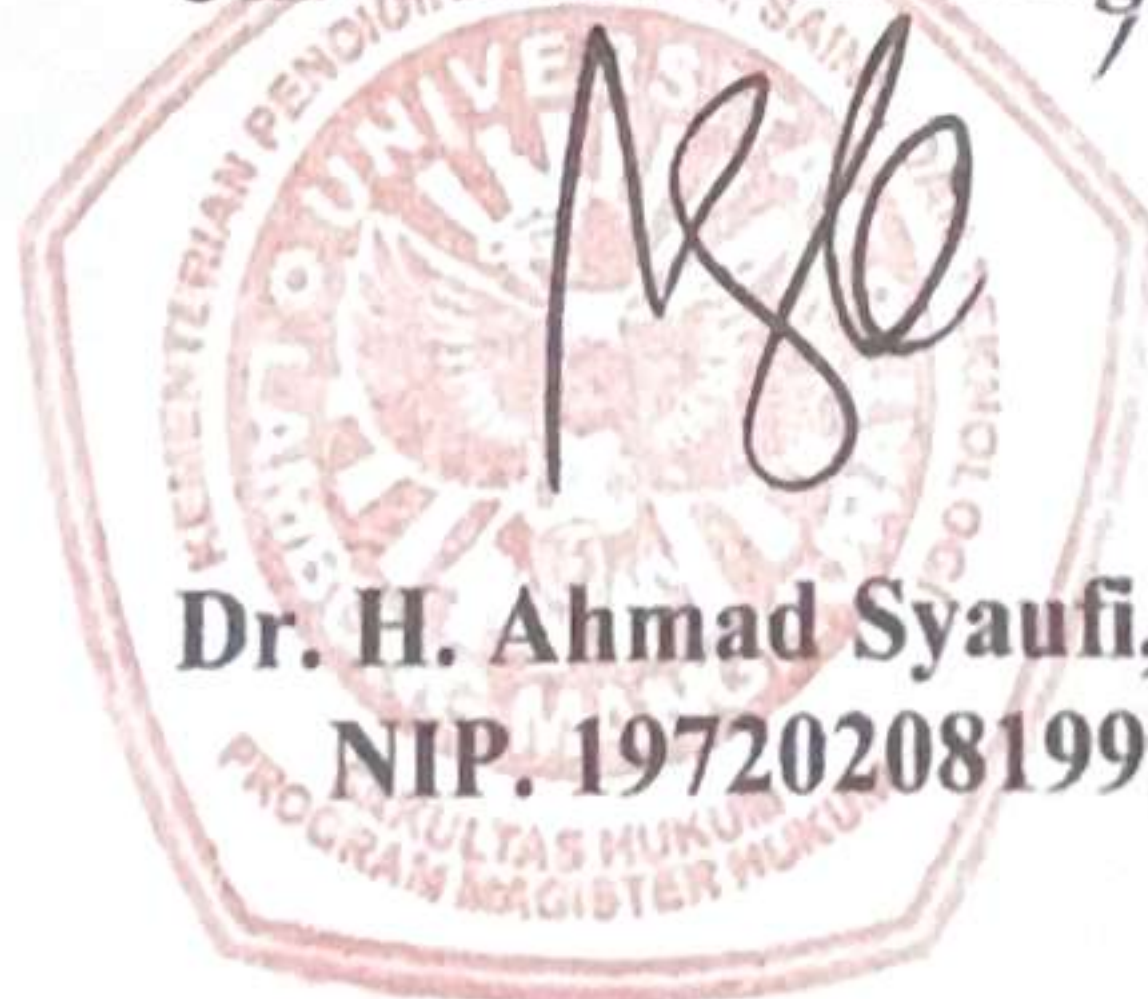
**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing


Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.
NIP. 197110032000031002

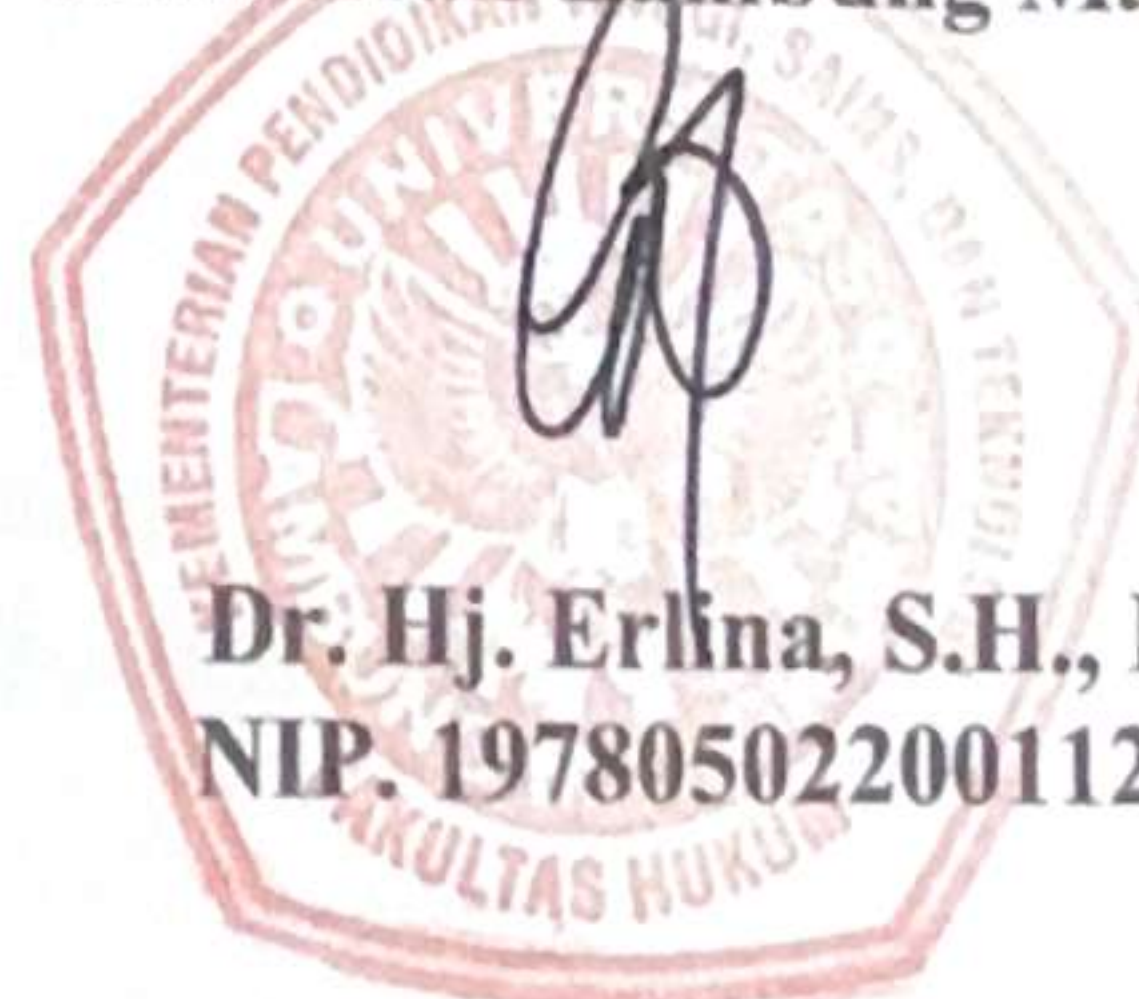
Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



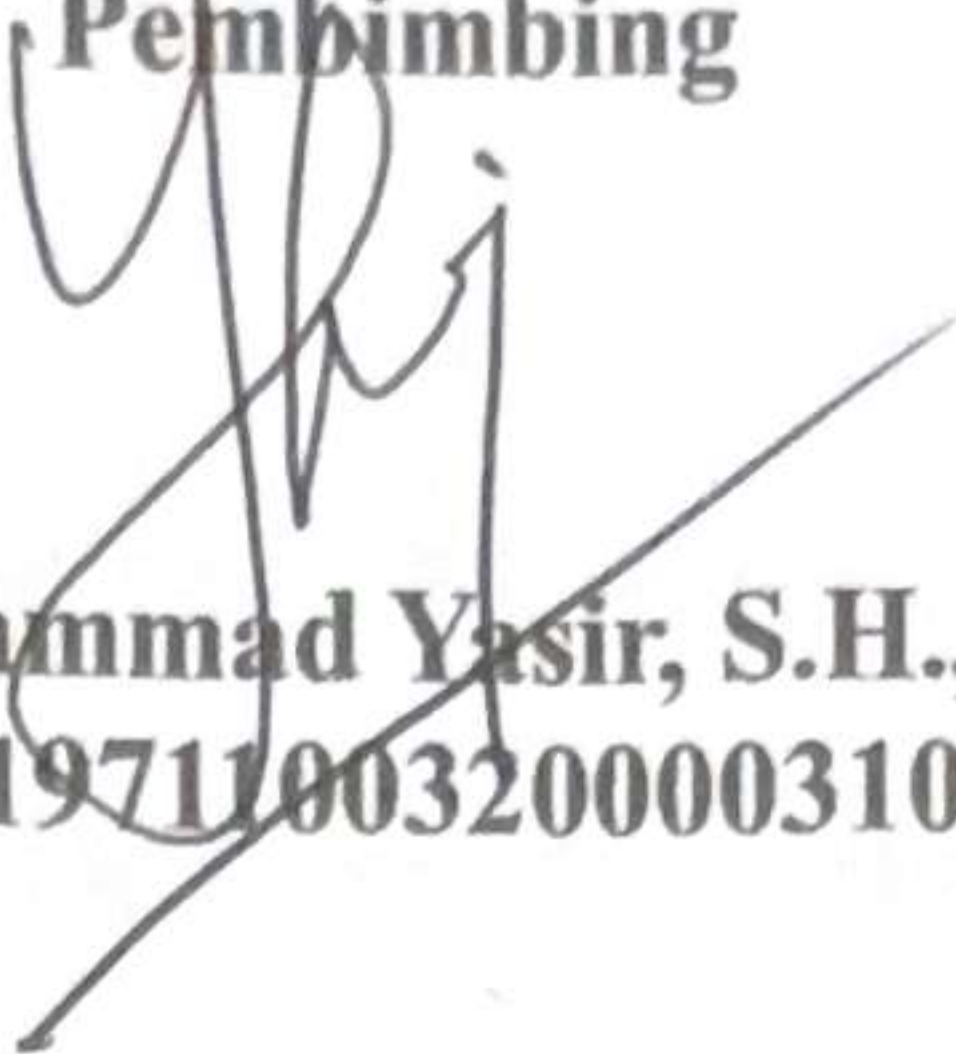
Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal**

Pembimbing



**Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.
NIP. 197110032000031002**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 7 Juli 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Noor Hafidah, S.H., M. Hum

Sekretaris : Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Anggota : Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia Rizka Anshari

NIM : 2420215320011

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Acara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Banjarmasin, 7 Juli 2026



embuat pernyataan,

Amelia Rizka Anshari

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hukum bukan sekedar teks tertulis, melainkan instrumen keadilan yang terus berevolusi seiring zaman”

Karya sederhana ini Penulis persembahkan kepada:

1. Orangtua Tercinta, H. Mohammad Zamroni Anshari dan Hj. Sri Ratna Marlina
Terimakasih atas kasih sayang, doa yang tidak pernah putus, dukungan, pengorbanan, serta kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Abah dan Mama.
2. Saudara Kandung Tersayang, M. Noor Zaidan Anshari
Yang selalu memberikan dukungan dan kebersamaan dalam setiap proses yang saya jalani. Terimakasih atas perhatian dan dukungan yang selalu menguatkan.
3. Dimas Wijanarko
Yang selalu hadir ketika dekat maupun jauh, untuk memberikan dukungan, pengertian, kesabaran, doa dan semangat di tengah proses penyusunan tesis ini. Terimakasih atas kepercayaan dan kebersamaan yang telah diberikan.
4. Diri sendiri, Amelia Rizka Anshari
Terimakasih karena sudah berani mengambil keputusan untuk melanjutkan Pendidikan. Terimakasih telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan, hambatan, serta proses panjang yang dilalui hingga tesis ini dapat diselesaikan. Semoga segala usaha dan pengorbanan yang telah dilalui menjadi amal kebaikan yang bernilai di sisi Allah SWT dan bermanfaat bagi manusia lain.

RIZKA ANSHARI, AMELIA. 2026. KEKUATAN PEMBUKTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TERBIT OTOMATIS MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H. 115 halaman.

RINGKASAN

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik telah mendorong lahirnya sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) yang dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dalam praktiknya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur mekanisme penerbitan perizinan berusaha secara otomatis oleh sistem untuk kegiatan usaha berisiko rendah dan menengah rendah, sehingga melahirkan fenomena hukum baru yang dalam penelitian ini disebut sebagai KTUN instan, yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang terbit secara algoritmik tanpa melalui proses pertimbangan, verifikasi substantif, dan penetapan oleh pejabat tata usaha negara yang berwenang. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan persoalan pada tataran teknis birokrasi, tetapi juga memunculkan persoalan normatif dan konseptual yang fundamental dalam hukum administrasi negara, khususnya berkaitan dengan legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hukum bagi warga negara. Penelitian ini mengkaji dua persoalan pokok: pertama, apa *ratio legis* penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara secara otomatis melalui sistem OSS-RBA; dan kedua, bagaimana implikasi yuridis penerbitan KTUN secara otomatis tersebut terhadap pembuktian dalam pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara normatif-kualitatif.

Pembahasan Bab II menunjukkan bahwa *ratio legis* penerbitan KTUN secara otomatis melalui sistem OSS-RBA bertumpu pada semangat penyederhanaan dan percepatan perizinan berusaha sebagaimana dikehendaki UU Cipta Kerja. Namun, ditinjau dari perspektif teori kewenangan, khususnya konsep atribusi dan delegasi kewenangan sebagaimana dikembangkan oleh F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, terdapat konflik norma vertikal antara UU Cipta Kerja dan PP Nomor 28 Tahun 2025. UU Cipta Kerja hanya mengamanatkan perizinan yang “cepat dan sederhana”, namun PP Nomor 28 Tahun 2025 justru mentransformasi mandat tersebut menjadi perizinan yang “instan” dengan menghilangkan *due process administrative* pejabat tata usaha negara (*beschikkingsbevoegdheid*). Kondisi ini menempatkan PP Nomor 28 Tahun 2025 dalam posisi *ultra vires* terhadap undang-undang induknya, karena peraturan pelaksana telah melampaui batas delegasi norma yang diberikan, sehingga menggerus asas legalitas, asas akuntabilitas, dan

asas kepastian hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pembahasan Bab III mengungkap bahwa penerbitan KTUN secara otomatis melalui sistem OSS-RBA menimbulkan implikasi yuridis yang fundamental terhadap sistem pembuktian di PTUN. Berdasarkan teori pembuktian, khususnya asas *praesumptio iustae causa*, *vrij bewijstheorie*, dan doktrin *omkering van de bewijslast*, terdapat tiga persoalan utama: pertama, asas praduga keabsahan KTUN tidak dapat diberlakukan secara utuh terhadap keputusan yang lahir dari proses algoritmik karena tidak dapat diidentifikasi pejabat yang bertanggung jawab secara personal; kedua, beban pembuktian menjadi timpang akibat asimetri informasi yang struktural karena penggugat tidak memiliki akses terhadap jejak algoritmik (*audit trail*) sistem OSS-RBA, sementara tergugat memiliki akses penuh; dan ketiga, kekuatan pembuktian alat bukti elektronik yang dihasilkan sistem OSS-RBA belum diklasifikasikan secara normatif antara bukti sempurna (*volledig bewijs*) dan bukti bebas (*vrij bewijs*) dalam hukum acara PTUN. Kondisi ini diperparah dengan kekosongan norma dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang tidak secara spesifik mengatur standar pembuktian KTUN otomatis, sehingga berpotensi menciptakan disparitas putusan hakim dan ketidakpastian hukum bagi warga negara yang bersengketa di PTUN. Atas dasar hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan dua preskripsi *de lege ferenda*: pertama, revisi PP Nomor 28 Tahun 2025 untuk mengembalikan mekanisme validasi administratif pejabat TUN yang berwenang guna menjamin akuntabilitas KTUN; dan kedua, penerbitan Peraturan Mahkamah Agung yang secara khusus mengatur standar kekuatan pembuktian alat bukti elektronik algoritmik, mekanisme akses *audit trail*, dan pedoman penerapan *praesumptio iustae causa* dalam sengketa KTUN otomatis di PTUN.

RIZKA ANSHARI, AMELIA. 2026. Kekuatan Pembuktian Keputusan Tata Usaha Negara Terbit Otomatis Melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* Dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.** 115 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Keputusan Tata Usaha Negara otomatis, OSS-RBA, kekuatan pembuktian, beban pembuktian, konflik norma vertikal, *ultra vires*, *beschikkingsbevoegdheid*, *praesumptio iustae causa*, *audit trail*, PTUN.

Penelitian ini bertujuan menganalisis ratio legis penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) secara otomatis melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) serta implikasi yuridisnya terhadap pembuktian dalam pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Permasalahan pokok yang dikaji adalah: (1) apa *ratio legis* penerbitan KTUN secara otomatis melalui sistem OSS-RBA; dan (2) bagaimana implikasi yuridis KTUN otomatis tersebut terhadap pembuktian di PTUN. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, ditinjau dari teori kewenangan, terdapat konflik norma vertikal antara Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 karena Peraturan Pemerintah tersebut telah melampaui batas delegasi norma dengan mengubah perizinan “cepat dan sederhana” menjadi perizinan “instan” yang menghilangkan *due process administrative* pejabat Tata Usaha Negara (*beschikkingsbevoegdheid*), sehingga berpotensi *ultra vires* terhadap undang-undang induknya; kedua, ditinjau dari teori pembuktian, KTUN otomatis menimbulkan ketimpangan beban pembuktian (*omkering van de bewijslast*) akibat asimetri informasi, melemahkan penerapan asas *praesumptio iustae causa*, serta menciptakan kekosongan norma mengenai klasifikasi kekuatan pembuktian antara *volledig bewijs* dan *vrij bewijs* dalam hukum acara PTUN. Penelitian ini merekomendasikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan penerbitan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur standar pembuktian KTUN otomatis secara khusus.

RIZKA ANSHARI, AMELIA. 2026. *Evidentiary Weight of Automatically Issued State Administrative Decisions Through the Online Single Submission Risk Based Approach in Administrative Court Proceedings*. Master of Law Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Advisor: **Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H. 115 pages.**

ABSTRACT

Keywords: *Automatic State Administrative Decision, OSS-RBA, evidentiary weight, burden of proof, vertical norm conflict, ultra vires, beschikkingsbevoegdheid, praesumptio iustae causa, audit trail, Administrative Court (PTUN).*

This research examines the ratio legis of the automatic issuance of State Administrative Decisions (KTUN) through the Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), and its juridical implications upon evidentiary procedure before the Administrative Court (PTUN). Employing a prescriptive normative legal research methodology with statutory, conceptual, and analytical approaches, this study identifies two principal findings. First, a vertical norm conflict exists between Law Number 6 of 2023 on Job Creation and Government Regulation Number 28 of 2025: whereas the former mandates merely "fast and simple" business licensing, the latter institutes "instant" licensing by algorithmically generating KTUN without deliberation or formal determination by the competent administrative official (beschikkingsbevoegdheid), thereby rendering Government Regulation Number 28 of 2025 ultra vires its parent statute and undermining the principles of legality, accountability, and legal certainty under Law Number 30 of 2014 on Government Administration. Second, the automatic issuance of KTUN produces fundamental evidentiary implications: the presumption of validity (praesumptio iustae causa) cannot be fully applied to algorithmically generated decisions absent an identifiable accountable official; structural information asymmetry disproportionately burdens the claimant who lacks access to the system's algorithmic audit trail, necessitating reversal of the burden of proof (omkering van de bewijslast); and a normative vacuum persists regarding the classification of evidentiary weight between conclusive proof (volledig bewijs) and free proof (vrij bewijs) in PTUN procedural law. This research recommends, de lege ferenda, the revision of Government Regulation Number 28 of 2025 to reinstate administrative validation by a competent TUN official prior to licence issuance, and the issuance of a Supreme Court Regulation specifically governing evidentiary standards for algorithmic KTUN in PTUN proceedings.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
1. Tujuan Penelitian:.....	15
2. Kegunaan Penelitian.....	16
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Metode Penelitian	43
1. Jenis Penelitian.....	43
2. Tipe Penelitian.....	44
3. Sifat Penelitian	45
4. Pendekatan Masalah	46
5. Sumber Bahan Hukum	47
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	48
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	49
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	49
BAB II.....	50
RATIO LEGIS PENERBITAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SECARA OTOMATIS MELALUI SISTEM OSS-RBA.....	50
A. Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosilogis Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	50
B. Proses Pembentukan Regulasi Perizinan Berusaha Terbit Otomatis Melalui OSS-RBA.....	58

C. <i>Ratio Legis</i> Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Bentuk Perizinan Berusaha Secara Otomatis Melalui OSS-RBA	65
BAB III	81
IMPLIKASI YURIDIS KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TERBIT OTOMATIS TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM SENGKETA PERADILAN TATA USAHA NEGARA	81
A. Permasalahan dan Ketidakjelasan Prosedur Keputusan Tata Usaha Negara Terbit Otomatis Melalui OSS-RBA	81
B. Implikasi Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara Terbit Otomatis Terhadap Alat Bukti Dan Beban Pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara	89
C. Implikasi Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara Terbit Otomatis Terhadap Kekuatan Pembuktian dan Keabsahan Hukum	96
BAB IV	112
PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Risiko Perizinan Berusaha OSS-RBA	4
Tabel 1. 2 Orisinalitas Penelitian	10